

RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Dokumen ini disusun sebagai pedoman perencanaan tahunan yang bertujuan mengarahkan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan dengan potensi bahari, budaya, dan keragaman destinasi unggulan memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dokumen rencana kerja ini disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau.”

Melalui sasaran tersebut, Dinas Pariwisata berkomitmen untuk memperkuat kualitas destinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, memperluas pemasaran, serta mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta mampu mendorong terwujudnya pariwisata Kepulauan Riau yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan menjadi landasan kuat bagi kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, September 2025

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau



HASAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19771110 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	51
BAB V PENUTUP.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau.....	10
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.....	25
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.....	32
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kepulauan Riau	44
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	49
Tabel 4.1.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Skema Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2025.....	47
-------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja tahun 2026 adalah rencana kerja ke-1 dari pelaksanaan rencana strategis dan RPJMD Kepulauan Riau tahun 2025-2029. Rencana kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, kegiatan, sub kegiatan, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah - langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), di mana kebijakan umum APBD ditetapkan secara Bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan pariwisata dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kemudian Dinas Pariwisata menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang pariwisata dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun anggaran 2026.

1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 14) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 - 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
 - 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
 - 23) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;

- 24) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Provinsi Kepulauan Riau;
- 25) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
- 26) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 903);
- 27) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);
- 28) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan serta menentukan sasaran dengan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata pada tahun 2026.
- b. Melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran dan tepat waktu.
- c. Memberikan penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan secara transparan dan akuntabel.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rencana kerja tahun 2026 adalah pelaksanaan penyusunan rencana kerja ke-1 dari pelaksanaan rencana strategis dan RPJMD Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

Dari Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata sampai dengan Tahun 2024 (terlampir) dapat kita lihat bahwa semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi dengan sangat baik.

Realisasi kinerja program yang memenuhi target kinerja hasil ada 4 (empat) program yaitu pada Program Pemasaran Pariwisata pada indikator; Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara; pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada indikator; Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara dan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual; Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya; dan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Mempedomani skala peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 6 (delapan) Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang berkategori kinerja/ status Sangat Tinggi (ST) yaitu; indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (100%), Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (100%), Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (113,08%), Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (202,67%),

Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (100%), Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (131,67%) dan Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (100%).

Menurut analisa kami penyebab terpenuhinya target kinerja program sampai sejauh ini adalah adanya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Pariwisata pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Konsistennya perencanaan terhadap penganggaran dan pelaksanaan yang telah disusun sebelumnya.
2. Beberapa sub kegiatan mengalami serapan yang rendah dikarenakan terdapatnya tunda bayar, yang akan dianggarkan penyelesaiannya pada tahun anggaran berikutnya. Antara lain pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024 dapat di lihat pada **Tabel 2.1. di bawah:**

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,52	1,9	1,9	1,9	100,00	2,00	2,00	79,37
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,15	2,09	1,89	1,89	100,00	1,90	1,90	88,37
		Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,90	1,77	1,64	1,64	100,00	1,65	1,65	86,84
3.26.02.1.0 1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Daya Tarik	14	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.01 .0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.02.1.01 .0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	6	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.01 .0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	35	0	1	1	100,00	0	1	2,86
3.26.02.1.01 .0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	200	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kawasan Strategis	22	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.02 .0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.02 .0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	4	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.02.1.02 .0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	28	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.02 .0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	125	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Destinasi	11	0	0	0	0,00	2	2	18,18
3.26.02.1.03 .0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	2	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.03 .0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	6	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.02.1.03 .0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Dokumen	2	1	0	0	0,00	1	2	100,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.02.1.03.0013	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Dukung Dalam Rangka Menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Dokumen	3	0	1	1	1,00	0	1	33,33
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Industri	50	10	10	10	100,00	0	20	40,00
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	200	56	30	30	100,00	0	86	43,00
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	3.621,8	1.530,9	1.474,3	1.667,1	113,08	2.497,8	2.497,8	68,96
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	3.606.151	2.295.496	1.722.943	3.491.947	202,67	3.500.450	3.500.450	97,07

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	Promosi	42	6	6	6	100,00	7	19	45,24
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	28	38	33	33	100,00	3	74	264,29
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	5	0	0	0	0,00	1	1	20,00
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	90	14	10	10	100,00	20	44	48,89
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	14,08	0	2,22	2,22	100,00	2,64	4,86	34,52

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang Dikembangkan dan Disediakan Sarana dan Prasarannya	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	2	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	6	1	1	1	100,00	1	3	50,00
3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	3	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.04.1.02 .0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	0	0	0	0,00	1	1	100,00
3.26.04.1.02 .0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	5	0	1	1	100,00	0	1	20,00
3.26.04.1.02 .0012	Penyusunan Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Strategis Bidang Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.04.1.02 .0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	250	60	0	0	0,00	0	60	24,00
3.26.04.1.02 .0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Terlaksanakanya Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	16	0	2	2	100,00	6	8	50,00
3.26.04.1.02 .0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.04.1.02 .0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	60	55	60	60	100,00	60	175	291,67
3.26.04.1.02 .0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	19,61	5,58	7,61	7,61	100,00	9,61	22,80	116,27
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	2.635	82	64	64	100,00	130	276	10,47
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	1290	82	64	64	100,00	50	196	15,19
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	5	0	0	0	0,00	1	1	20,00
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	305	0	0	0	0,00	40	40	13,11
3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	600	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	440	0	0	0	0,00	40	40	9,09
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	6	1	0	0	0,00	1	2	33,33
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	600	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	400	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	200	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	100,00	BB	BB	100,00
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83,80	0	0	0	0,00	83,46	83,46	99,59

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,50	81,91	88,86	88,86	100,00	88,90	88,90	99,33
3.26.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	2	2	2	100,00	2	6	37,50
3.26.01.1.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	31	1	6	6	100,00	6	13	41,94
3.26.01.1.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	1	5	5	100,00	5	11	36,67
3.26.01.1.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.01.1.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	72	47	45	45	100,00	71	71	98,61
3.26.01.1.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	1	1	1	100,00	1	3	50,00
3.26.01.1.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	1	1	100,00	1	3	50,00
3.26.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Stel	100	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.01.1.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	15	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.01.1.05 .0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.26.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.01.1.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	18	3	3	3	100,00	3	9	50,00
3.26.01.1.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	2	2	2	100,00	2	6	50,00
3.26.01.1.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Unit	50	16	8	8	100,00	0	24	48,00
3.26.01.1.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	16	8	8	100,00	0	24	48,00
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3.26.01.1.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	1	1	1	100,00	1	3	50,00
3.26.01.1.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai sesuai Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
						Target Kinerja Renja tahun 2024	Realisasi Kinerja Renja tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra s/d Tahun 2025 (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.26.01.1.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	12	12	12	100,00	12	36	50,00
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Sesuai Rencana Kebutuhan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3.26.01.1.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	2	2	2	100,00	2	6	50,00
3.26.01.1.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	6	6	6	100,00	6	18	50,00
3.26.01.1.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	280	60	23	23	100,00	30	113	40,36

Dari Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata sampai dengan Tahun 2024 realisasi target indikator seluruh sub kegiatan (24 sub kegiatan) berkategori kinerja/ status Sangat Tinggi (ST) yaitu: 3 (tiga) sub kegiatan pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, 2 (dua) pada Program Pemasaran Pariwisata, 3 (tiga) sub Kegiatan pada Program Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, 1 (satu) sub kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 15 (lima belas) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pariwisata digunakan Indikator Kinerja Utama meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 903) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di atas maka Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau untuk periode Renstra 2025-2029 berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan meliputi:

1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)
2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)
3. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)
4. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)
5. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)
6. Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)
7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)
8. Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau

No.	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	NA	NA	NA	2,00	2,11	2,21	2,31	2,41	
2	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	NA	NA	NA	1,90	1,95	2,09	1,89	2,10	
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	NA	NA	NA	1,65	1,70	1,77	1,64	1,85	
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	370,5	474,2	1.474,3	2.497,8	2.722,6	1.530,9	1.667,1	1.446,7	
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1.988.600	2.426.092	1.722.943	3.500.450	3.512.500	2.295.496	3.491.947	3.185.814	
6	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	NA	NA	4,65	NA	NA	2,22	4,69	
7	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	2,00	2,00	2,00	9,61	1,63	3,95	2,03	8,92	
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
9	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	NA	NA	NA	83,46	83,58	83,58	83,68	83,47	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	NA	NA	88,90	88,95	89,00	89,15	93,63	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu koordinasi dan kerja sama antara pusat dan daerah muncul sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Pengaturan kewenangan ini menimbulkan arogansi daerah untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya dan wilayah administratifnya masing-masing, sehingga mengakibatkan pengembangan kegiatan kepariwisataan antara Pusat dan Daerah kurang terkoordinasi dengan baik. Begitu pula koordinasi antara pemerintah dan swasta. Hal ini dapat memicu kecenderungan orientasi pembangunan yang hanya mengejar peningkatan PAD yang mendorong masing-masing daerah berkompetisi secara kurang sehat untuk menarik pasar wisatawan ke daerahnya dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak memberikan kenyamanan kunjungan wisatawan dan bahkan mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap objek wisata yang berdampak pada penurunan daya dukung dan kualitas objek tersebut.

Selain itu, ancaman yang paling serius atas implementasi otonomi daerah adalah munculnya paradigma sektoral yang menggilas peran lintas sektoral pariwisata, yang selanjutnya berpengaruh besar terhadap pembangunan faktor pendukung pariwisata seperti aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan promosi. Padahal, pembangunan kepariwisataan bersifat *borderless*, yang berarti pembangunan dan pengelolaannya berlangsung lintas batas administratif dan lintas sektor. Oleh karena itu, hendaknya setiap pemegang kewenangan otonom dan pemangku kepentingan pariwisata harus berpikir nasional (Indonesia) dan bertindak lokal (daerah). Dengan konsep ini, berarti para pemegang kewenangan daerah otonom tidak menutup diri bagi kebijakan pariwisata secara nasional untuk kepentingan kemajuan daerahnya.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan yang diharapkan mampu mengatasi masalah koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia dengan Perpres No. 64 tahun 2014,

dan Perpres No. 63 tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan. Dengan adanya peraturan ini, maka jelas sudah posisi sektor pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan di Indonesia sehingga diharapkan tujuan dari pembangunan kepariwisataan dalam tercapai dan *multiplier effect* dari kegiatan pariwisata dapat menjadi lebih efektif.

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan di mana Dinas Pariwisata mengampu pada tujuan "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua", Pemerintah Daerah Kepulauan Riau juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 757 Tahun 2017 Tentang Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* Provinsi Kepulauan Riau di mana Dinas Pariwisata ikut bertanggungjawab dalam penyusunan rencana aksi daerah sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Selain itu Dinas Pariwisata perlu mengenali peluang dan tantangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal - antara pusat dengan daerah, maupun horizontal - antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisata:

❖ **Peluang (*opportunities*)**

- Adanya kebijakan nasional berlakunya skema visa khusus yang berlaku di Kepulauan Riau (Bebas visa kunjungan bagi pemegang Permanent Resident (PR) Singapura, Visa kunjungan pendek (short

- visit visa), ebas visa bagi pemegang Student Pass Singapura, dan Bebas visa bagi pemegang Long Term Visit Pass (LTVP) Singapura;
- Letak Geostrategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara-Negara tetangga;
 - Daya dukung Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia;
 - Sebagian Aksesibilitas destinasi yang relatif mudah dan baik;
 - Adanya kebijakan skala nasional dan internasional tentang pengembangan pariwisata terutama wisata bahari;
 - Dijadikannya wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Kawasan Strategis Pengembangan Kepariwisata Nasional;
 - Telah ditetapkannya Batam-Bintan sebagai kawasan pengembangan nasional;
 - Dukungan Kelembagaan Nasional pada pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - Adanya kebijakan skala nasional tentang Pemberlakuan Kunjungan Bebas Visa;
 - Berkembangnya usaha pariwisata dunia, Indonesia maupun di Kepulauan Riau yang begitu pesat dan menjanjikan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kepulauan Riau baik alam, budaya maupun buatan yang khas/unik dapat berdaya saing dan daya banding yang tinggi dengan luar daerah Kepulauan Riau;
 - Sarana dan prasarana kepariwisataan Kepulauan Riau serta pendukung/penunjangnya yang semakin memadai;
 - Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau;
 - Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

❖ **Tantangan (*threats*)**

- Berkembang pesatnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di luar wilayah Kepulauan Riau sebagai pesaing/ kompetitor yang semakin tinggi;
- Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata Kepulauan Riau baik alam, budaya, maupun buatan sebagai daya saing dan daya banding perlu ditingkatkan kualitasnya;
- Tampilan seni budaya sebagai daya tarik wisata di seluruh destinasi pariwisata Kepulauan Riau kualitas dan kuantitasnya perlu segera ditingkatkan;
- Kesadaran wisata, penerapan/pemahaman sapta pesona dan kesiapan seluruh stakeholder pariwisata serta masyarakat Kepulauan Riau belum maksimal;
- Sumber daya manusia kepariwisataan Kepulauan Riau kuantitas dan kualitasnya masih kurang;
- Perdagangan pasar bebas dalam negeri dan pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mengharuskan kepariwisataan Kepulauan Riau punya daya saing tinggi dan berstandar;
- Isu Keamanan yang bisa mempengaruhi citra pariwisata daerah;
- Meningkatnya persaingan antar destinasi pariwisata pada tingkat nasional dan regional;
- Bencana kabut asap yang sering melanda Kepulauan Riau khususnya pada musim kemarau;
- Nilai-nilai budaya lokal dapat tergerus oleh nilai-nilai budaya asing yang dengan bebas masuk ke negeri ini.

Meskipun perencanaan dan pengelolaan sektor kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau selama ini telah direncanakan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kabupaten/Kota, permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis pengembangan daya tarik wisata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

tetap muncul. Berikut ini isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Riau yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan adalah; belum adanya grand desain pembangunan kepariwisataan, belum optimalnya destinasi obyek wisata di Provinsi Kepulauan Riau; Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata, kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal, dan sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang masih belum optimal.
- 2) Pada Program Pemasaran Pariwisata isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan adalah; minimnya penyelenggaraan even pariwisata daerah, diperlukan insentif bagi pelaku industri pariwisata, diperlukan peningkatan promosi pariwisata serta tourism linkage networking antar lembaga dan antar kabupaten dan kota, strategi komunikasi pemasaran wisata yang belum terpadu, sinergi kemitraan pemasaran wisata masih belum optimal, dan kegiatan promosi wisata masih belum maksimal.
- 3) Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan adalah; sumber daya manusia pariwisata yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas baik dari industri pariwisata maupun SDM Aparatur Pemerintah Daerah serta koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif.
- 4) Pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan adalah; diperlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif, diperlukan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata, diperlukan perlindungan hukum terhadap industri kreatif, sarana prasarana ekonomi

kreatif belum optimal, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif, belum adanya standardisasi terhadap ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Isu strategis dan analisa kebutuhan yang berkembang saat ini menjadi pedoman dalam menyusun program, kegiatan, dan kegiatan serta anggaran yang akan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat **tabel 2.3** berikut;

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan RKPD
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,95 Hari	660.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,95 Hari	660.000.000,00	
			Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,70 Hari				Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,70 Hari		
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	2 Daya Tarik	310.000.000,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	2 Daya Tarik	310.000.000,00	
1.1	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	140.000.000,00	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	140.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7 Laporan	70.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	7 Laporan	70.000.000,00	
1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	100.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang	100.000.000,00	
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	2 Kawasan Strategis	200.000.000,00	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	2 Kawasan Strategis	200.000.000,00	
2.1	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kab. Bintan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	200.000.000,00	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kab. Bintan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	200.000.000,00	
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	1 Destinasi	100.000.000,00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	1 Destinasi	100.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.1	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Lokasi	100.000.000,00	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Lokasi	100.000.000,00	
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	10 Industri	50.000.000,00	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	10 Industri	50.000.000,00	
4.1	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Prov. Kepri	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	40 Unit Usaha	50.000.000,00	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Prov. Kepri	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	40 Unit Usaha	50.000.000,00	
II	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	2.722,6 Ribu orang	6.464.000.000,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	2.722,6 Ribu orang	6.464.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	3.512.500 Perjalanan				Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	3.512.500 Perjalanan		
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	7 Promosi	6.464.000.000,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	7 Promosi	6.464.000.000,00	
1.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1.164.000.000,00	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	1.164.000.000,00	
1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Prov. Kepri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Kegiatan	5.300.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Prov. Kepri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	15 Kegiatan	5.300.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	6,54 %	800.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	6,54 %	800.000.000,00	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang Dikembangkan dan Disediakan Sarana dan Prasarananya	1 Dokumen	200.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang Dikembangkan dan Disediakan Sarana dan Prasarananya	1 Dokumen	200.000.000,00	
1.1	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Prov. Kepri	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	200.000.000,00	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Prov. Kepri	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	200.000.000,00	
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	600.000.000,00	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	1 Dokumen	600.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50.000.000,00	
2.2	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Prov. Kepri	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	50 Orang	150.000.000,00	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Prov. Kepri	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	50 Orang	150.000.000,00	
2.3	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Prov. Kepri	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	2 Promosi	400.000.000,00	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Prov. Kepri	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	2 Promosi	400.000.000,00	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11,61 %	616.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11,61 %	616.000.000,00	
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	265 Orang	616.000.000,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	265 Orang	616.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.1	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	240 Orang	466.000.000,00	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	240 Orang	466.000.000,00	
1.2	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Prov. Kepri	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	25 Orang	100.000.000,00	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Prov. Kepri	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	25 Orang	100.000.000,00	
1.3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	50.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	50.000.000,00	
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	15.626.938.329,94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	15.626.938.329,94	
			Indeks Profesionalisme Sumber Daya	83,58 Indeks				Indeks Profesionalisme Sumber Daya	83,58 Indeks		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Manusia Perangkat Daerah					Manusia Perangkat Daerah			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,95 Indeks				Indeks Kepuasan Masyarakat	88,95 Indeks		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.000.000,00	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	150.000.000,00	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian	100 %	13.065.446.601,94	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	100 %	13.065.446.601,94	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Laporan Keuangan								
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	12.541.654.601,93	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	12.541.654.601,93	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	513.792.000,01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	513.792.000,01	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	375.400.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	375.400.000,00	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	275.400.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	275.400.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.052.031.680,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.052.031.680,00	
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00	
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	112.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	112.000.000,00	
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	790.031.680,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	790.031.680,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	10 Unit	200.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	10 Unit	200.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	436.251.728,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	436.251.728,00	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.760.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.760.000,00	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	357.491.728,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	357.491.728,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Sesuai Rencana Kebutuhan	100 %	297.808.320,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Sesuai Rencana Kebutuhan	100 %	297.808.320,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	111.224.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	111.224.000,00	
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	145.074.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	145.074.000,00	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	41.510.320,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Tanjungpinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	41.510.320,00	
					24.166.938.329,94					24.166.938.329,94	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, masyarakat, asosiasi yang merupakan stakeholder bidang kepariwisataan sebagai mitra kerja dinas dalam mewujudkan tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau **"Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif "**.

Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah mengakomodir usulan dari kabupaten/kota, masyarakat, maupun dari stakeholder pariwisata lainnya.

Berikut usulan dari masyarakat dan usulan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota yang diterima, dapat dilihat pada **tabel 2.4** sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Provinsi Kepulauan Riau

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Kota Tanjungpinang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	Usulan Masyarakat
		Kabupaten Natuna		2 Kegiatan	Usulan Masyarakat
		Prov. Kepri		1 Kegiatan	Usulan Masyarakat
		Kota Tanjungpinang		4 Kegiatan	Usulan Kota Tanjungpinang
		Kota Batam		4 Kegiatan	Usulan Kota Batam
		Kab. Lingga		2 Kegiatan	Usulan Kab. Lingga
2	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,	Kota Tanjungpinang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan	1 Dokumen	Usulan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Batam	Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Usulan Masyarakat
		Kab. Bintan		2 Dokumen	Usulan Kab. Bintan
		Kota Tanjungpinang		1 Dokumen	Usulan Kota Tanjungpinang
3	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Kota Tanjungpinang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Lokasi	Usulan Masyarakat
		Kota Batam		2 Lokasi	Usulan Masyarakat
		Kota Tanjungpinang		1 Lokasi	Usulan Kota Tanjungpinang
		Kab. Lingga		4 Lokasi	Usulan Kab. Lingga
4	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Kab. Lingga	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang	Usulan Kab. Lingga
4	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kabupaten Bintan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 Orang	Usulan Kab. Bintan
		Kab. Lingga		20 Orang	Usulan Kab. Lingga
5	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kota Tanjungpinang	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	20 Orang	Usulan Kota Tanjungpinang
		Kab. Lingga		60 Orang	Usulan Kab. Lingga
6	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Kota Tanjungpinang	Jumlah Terlaksanakannya Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Promosi	Usulan Kota Tanjungpinang
7	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kota Tanjungpinang	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	20 Orang	Usulan Kota Tanjungpinang
8	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Bintan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	Usulan Kab. Bintan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

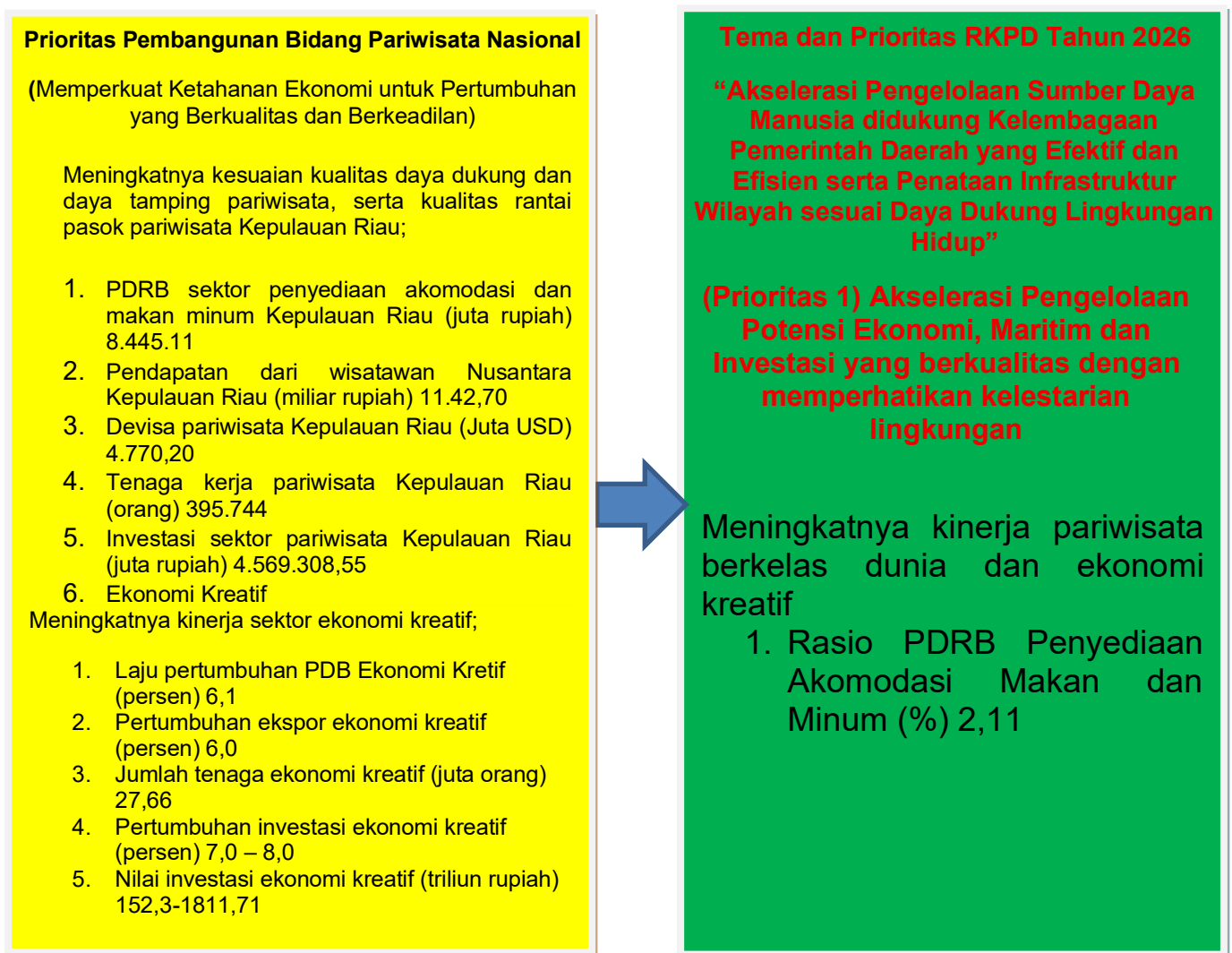
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 mengagendakan 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu;

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM),
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan *agromaritim industry* di sentra produksi melalui peran aktif koprasi,
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas,
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan,
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan *highlight* pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen

Keterkaitan antara Prioritas Dinas Pariwisata, Prioritas daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional terlihat pada skema **3.1** berikut ini:



Gambar 3.1 Skema Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi kepulauan Riau Tahun 2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yaitu *"Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif"*.

Sementara itu sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut;

1. Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
2. Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata,
3. Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif, dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada **tabel 3.1** berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	OUTCOME	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1.	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)			1,9	2,11
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (hari)	1,89	1,95
				Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (hari)	1,64	1,70
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	1.667,1	2.722,6
				Jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	3.491.947	3.512.500
			Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	2,22	6,54

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	OUTCOME	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET KINERJA TAHUN 2026
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7,61	11,61
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB
				Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	NA	83,58
				Indeks Kepuasan Masyarakat	88,86	88,95

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2025-2029 dalam urusan pariwisata sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini diusulkan 5 (Lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

- 1.1. Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
- 1.2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
- 1.3. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi

2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- 2.1. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

- 3.1. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

- 4.1. Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)

II. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- 1.1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
- 1.2. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri

III. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif

- 1.1. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik

2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- 2.1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- 2.2. Fasilitas Kekayaan Intelektual
- 2.3. Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

- 1.1. Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 1.2. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
- 1.3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2026 ini juga telah mengakomodir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagaimana dalam Rencana Aksi Daerah, di mana Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bertanggungjawab atas pencapaian target SDGs indikator daerah tahun 2026 di antaranya;

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 2.722,6 Ribu Orang, Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara sebesar 3.512.500 Perjalanan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2026 ini juga telah mengakomodir pelaksanaan Program dan kegiatan pengarusutamaan gender yaitu; pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata), dan pada Program Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Fasilitasi Kekayaan Intelektual).

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 pada dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan pagu indikatif Rp. 24.166.938.329,94 dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 disajikan pada **table 4.1** berikut:

Tabel 4.1. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					24.166.938.329,94				22.608.628.201,94
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari		1,95	660.000.000,00			2,00	450.000.000,00
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari		1,70				1,75	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Daya Tarik		2	310.000.000,00			3	300.000.000,00
3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	Prov. Kepri	1	140.000.000,00	PAD		1	150.000.000,00
3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	Prov. Kepri	7	70.000.000,00	PAD		7	50.000.000,00

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.02.1.0 1.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Prov. Kepri	25	100.000.000,00	PAD		25	100.000.000,00
3.26.02.1 .02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kawasan Strategis		2	200.000.000,00			5	-
3.26.02.1.0 2.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	Kab. Bintan	2	200.000.000,00	PAD		0	-
3.26.02.1 .03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Destinasi		1	100.000.000,00			2	100.000.000,00
3.26.02.1.0 3.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	Prov. Kepri	1	100.000.000,00	PAD		1	100.000.000,00
3.26.02.1 .04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Industri		10	50.000.000,00			10	50.000.000,00
3.26.02.1.0 4.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha	Unit Usaha	Prov. Kepri	40	50.000.000,00	PAD		40	50.000.000,00

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)								
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang		2.722,6	6.464.000.000,00			2.947,4	4.885.000.000,00
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan		3.512.500				3.525.750	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	Promosi		7	6.464.000.000,00			7	4.885.000.000,00
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Prov. Kepri	5	1.164.000.000,00	PAD		5	1.150.000.000,00
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	Prov. Kepri	15	5.300.000.000,00	PAD		10	3.735.000.000,00
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%		6,54	800.000.000,00			8,42	900.000.000,00

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang Dikembangkan dan Disediakan Sarana dan Prasarannya	Dokumen		1	200.000.000,00			1	-
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	Prov. Kepri	1	200.000.000,00	PAD		0	-
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen		1	600.000.000,00			1	900.000.000,00
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Prov. Kepri	1	50.000.000,00	PAD		1	300.000.000,00
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	Prov. Kepri	50	150.000.000,00	PAD		50	200.000.000,00
3.26.04.1.02.0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	Prov. Kepri	2	400.000.000,00	PAD		2	400.000.000,00
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%		11,61	616.000.000,00			13,61	870.000.000,00

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		265	616.000.000,00			300	870.000.000,00
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	Prov. Kepri	240	466.000.000,00	PAD		250	550.000.000,00
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	Prov. Kepri	25	100.000.000,00	PAD		50	120.000.000,00
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	Prov. Kepri	1	50.000.000,00	PAD		1	200.000.000,00
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		BB	15.626.938.329,94			BB	15.503.628.201,94
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks		83,58				83,58	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		88,95				89,00	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	Dokumen		2	200.000.000,00			3	248.181.600,00

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah								
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kota Tanjungpinang	5	150.000.000,00	PAD		5	200.000.000,00
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kota Tanjungpinang	5	50.000.000,00	PAD		5	48.181.600,00
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	%		100	13.065.446.601,94			100	13.065.446.601,94
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Kota Tanjungpinang	72	12.541.654.601,93	PAD		72	12.541.654.601,93
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kota Tanjungpinang	1	513.792.000,01	PAD		1	513.792.000,01
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kota Tanjungpinang	1	10.000.000,00	PAD		1	10.000.000,00
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi	%		100	375.400.000,00			100	375.400.000,00

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kepegawaian Perangkat Daerah								
3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kota Tanjungpinang	3	275.400.000,00	PAD		3	275.400.000,00
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kota Tanjungpinang	10	100.000.000,00	PAD		10	100.000.000,00
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	1.052.031.680,00			100	838.539.950,00
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kota Tanjungpinang	3	150.000.000,00	PAD		3	150.000.000,00
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kota Tanjungpinang	2	112.000.000,00	PAD		2	112.000.000,00
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kota Tanjungpinang	12	790.031.680,00	PAD		12	576.539.950,00
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Unit		10	200.000.000,00			10	200.000.000,00
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kota Tanjungpinang	10	200.000.000,00	PAD		10	200.000.000,00

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	436.251.728,00			100	478.251.700,00
3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kota Tanjungpinang	1	15.000.000,00	PAD		1	15.000.000,00
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	12	63.760.000,00	PAD		12	105.760.000,00
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	12	357.491.728,00	PAD		12	357.491.700,00
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Sesuai Rencana Kebutuhan	%		100	297.808.320,00			100	297.808.350,00
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Kota Batam, Kota Tanjungpinang	2	111.224.000,00	PAD		2	111.224.000,00
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	Kota Tanjungpinang	6	145.074.000,00	PAD		6	145.074.000,00

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
3.26.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kota Tanjungpinang	50	41.510.320,00	PAD		50	41.510.350,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Isi dari Rancangan Akhir Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di dalam Rencana Kerja Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan urusan pariwisata. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib, dan terpadu.
- b. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata.
- c. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun sumber pendanaan lainnya.
- d. Di dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD, dan Renstra Dinas Pariwisata)
- e. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 ini berisikan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata Kepulauan Riau, dengan meliputi beberapa aspek unggulan seperti pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran wisata, pengembangan industri pariwisata, pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Meningkatnya Kinerja Pariwisata Berkelas Dunia dan Ekonomi Kreatif".